

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agency theory didasarkan pada pemikiran bahwa agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemilik dan informasi tersebut terkadang menimbulkan adanya kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi atau yang biasa disebut dengan informasi asimetri dapat disebabkan adanya perbedaan persepsi, dimana pemilik mungkin tidak mengetahui apa saja yang menjadi preferensi agen, sehingga pemilik akan mengalami kesulitan melakukan perhitungan terhadap akun yang ada pada laporan keuangan (Adams, 1994). Sehingga, pemilik memerlukan suatu mekanisme yang dapat mengawasi aktivitas agen, untuk dapat meminimalkan permasalahan yang dapat muncul, antara pemilik dan agen. Sebagai konsekuensi dari pengawasan tersebut adalah meningkatnya *agency cost* (Ousama *et al* 2012 dalam Romadhon dan Isnalita, 2015).

Perkembangan dalam bidang ekonomi saat ini membawa dampak terhadap pengelolaan suatu bisnis dan penentuan strategi bersaing (Fitriani, 2010). Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan aktiva berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, organisasi bisnis semakin menitikberatkan akan kepentingannya yaitu *knowledge asset* atau biasa disebut aset pengetahuan sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud. Pengetahuan telah menjadi mesin baru dalam pengembangan suatu bisnis. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran aset pengetahuan tersebut adalah *intellectual*

capital yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi, maupun akuntansi.

Intellectual capital dapat didefinisikan yaitu semua proses berdasarkan aset tidak berwujud berbasis sumber daya pengetahuan yang biasanya tidak ditampilkan dalam neraca dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Wacana yang sering dihadapi mengenai modal intelektual yaitu bagaimana cara pengukuran dan penyajian modal intelektual. Berdasarkan konteks tersebut, perusahaan perlu mengembangkan strategi manajemen untuk dapat bersaing dipasaran, sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki dapat menciptakan *value added* (nilai tambah) bagi perusahaan (Fitriani, 2010).

Salah satu penyebab mulai maraknya pengungkapan *intellectual capital* yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk menghindari penilaian kurang baik yang diberikan investor terhadap perusahaan. Hal ini diungkapkan dalam penelitian Milgrom (1981) yang menyatakan bahwa jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan *intellectual capital* maka investor akan menganggap hal ini sebagai “kabar buruk”, sebagai contoh Milgrom mengumpamakan bahwa jika perusahaan tidak melakukan inovasi atau mungkin sering gagal dalam suatu percobaan teknis maka nilai perusahaan tersebut akan berkurang, karena dari kegagalan-kegagalan tersebut mencerminkan bahwa perusahaan tersebut dikelola oleh sumber daya manusia yang kurang berkompeten di bidangnya dan sumber daya manusia tersebut kurang tepat dalam menentukan cara-cara dalam melakukan pekerjaannya. Dengan melakukan pengungkapan *intellectual capital* maka penilaian buruk investor terhadap perusahaan dapat dihindari karena investor mendapat informasi yang mencukupi mengenai sumber daya yang

digunakan dalam perusahaan dan bagaimana efektivitas dan nilai tambah dari sumber daya tersebut dalam Zulkarnaen (2013).

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Arifah, 2012).

Pada dasarnya dalam pengelolaan perusahaan yang baik, ada mekanisme yang mendorong terciptanya *corporate governance* yaitu dewan komisaris, komite audit dan ukuran komite audit. Dewan komisaris dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tindakan manajer untuk mengungkapkan informasi mengenai *intellectual capital*. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen untuk mencegah tindakan kecurangan seperti menyajikan informasi yang tidak akurat dan relevan. Selain itu, komite audit memegang peran yang cukup penting dalam mewujudkan *corporate governance* karena komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka penerapan prinsip tata kelola (*corporate governance*) perusahaan yang baik, dengan tujuan untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen (Fitriani, 2010).

Penerapan *corporate governance*, dalam penelitian ini akan dilihat dengan menggunakan proksi jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit

dan jumlah rapat komite audit. Organ-organ ini akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Zulkarnaen (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh baik secara simultan maupun secara parsial antara komisaris independen, direksi independen dan komite audit sebagai unsur *corporate governance* (CG) terhadap luasnya pengungkapan *intellectual capital*. Sementara Fitriani (2010) pada penelitiannya menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital* sedangkan jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian ini memilih konteks di Indonesia karena terdapat pertimbangan berbagai hal, diantaranya adanya undang-undang yang mengatur tentang struktur dan organ maupun tata kelola perusahaan. Dimana, perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang diantaranya menguraikan secara singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai penerapan tata kelola perusahaan dengan baik, maka akan lebih banyak memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi (Fitriani, 2010).

Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 yaitu nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar. Indeks LQ 45 menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas dan

disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah. Indeks LQ 45 menjadi penyedia informasi bagi investor dalam menganalisis pergerakan harga saham dari saham-saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia karena 45 saham dalam LQ 45 memiliki likuiditas, kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik serta memiliki kapitalisasi pasar dan frekuensi perdagangan yang tinggi.

Pemilihan perusahaan dalam indeks LQ 45 dikarenakan bahwa perusahaan dalam indeks LQ 45 terdiri dari berbagai sektor perusahaan. Dengan adanya berbagai sektor perusahaan tersebut maka untuk pengungkapan *intellectual capital* menjadi lebih luas.

Kesenjangan penelitian serta hasil-hasil yang belum konsisten mendorong untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *corporate governance* terhadap *intellectual capital* pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45. Penelitian ini termotivasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2010). Perbedaan yang paling mendasar dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian, pada penelitian Fitriani (2010) objek penelitian yang dilakukan pada perusahaan keuangan sedangkan objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal lain yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengukuran *intellectual capital*, pada penelitian sebelumnya *intellectual capital* (modal intelektual) diukur dengan menggunakan *content analysis* sedangkan pada penelitian ini *intellectual capital* diukur dengan model *value added intellectual capital* (VAIC™) yang diciptakan oleh *physical capital/capital employed* (VACA), *human capital* (VAHU),

dan *structural capital* (STVA). Kombinasi dari ketiga *value added* tersebut di simbolkan dengan nama VAIC™ yang dikembangkan oleh Pulic (Ningrum, 2012). Penelitian ini menggunakan proporsi jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit.

Berdasarkan fenomena tersebut maka pihak-pihak yang berkepentingan mulai merasa perlu untuk melakukan perluasan dalam melakukan penilaian suatu perusahaan supaya dapat melakukan analisis secara lebih menyeluruh dan memperoleh hasil yang tepat. Pemanfaatan dan pengungkapan optimal itu dapat diperoleh salah satunya yaitu dengan mengungkapkan adanya *intellectual capital* yang dimiliki perusahaan sebagai salah satu perwujudan dari adanya pengungkapan *intangible asset* perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *Corporate Governance* dengan judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital* pada Perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dituliskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *intellectual capital*?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *intellectual capital*?
3. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *intellectual capital*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap *intellectual capital capital*.
2. Menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap *intellectual capital*.
3. Menguji pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *intellectual capital*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, lebih khususnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang *Corporate Governance* dengan menggunakan jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit terhadap modal intelektual (*intellectual capital*) pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademis

Memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital*, dimana bukti empiris tersebut dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya.

2) Bagi Praktisi

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan seperti pada perusahaan-perusahaan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia dalam menerapkan *Corporate Governance* sesuai ketentuan yang ada, sehingga dapat mengungkapkan modal intelektual.